

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Dr. Sri Sundari, SH., M.M., CGCAE.

Jabatan

: Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Jabatan : Oni Choiruddin, S.H., M.M.: Deputi Bidang Persidangan

selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta,

Agustus 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Oni Choiruddin, S.H., M.M. NIP.196804291997031001 <u>Dr. Sri Sundari, SH.,M.M., CGCAE.</u> NIP.196705281989022001



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K_{1111})	0,028
2	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K_{1211})	-
3	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K_{1311})	0,1
4	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₄₁₁)	-
5	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang rekomendendasi kebijakan atas tabulasi ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar yang ditetapkan (K ₂₁₁₁)	
6	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMASDA untuk pemantauan dan peninjauan sesuai standar yang ditetapkan (K ₂₂₁₁)	-

Kegiatan / RO		Kegiatan / RO	Anggaran		
	Pen	yelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	Rp	2.324.950.000,00	
	1	001 - Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Rp	1.775.500.000,00	
	2	dan Daerah 001-Dukungan Data dan Materi terkait	Rp	276.350.000,00	
	2	Kewenangan Alat Kelengkapan 001 - Laporan Materi Pengelolaan		-:	
	_	Aspirasi Masyarakat dan Daerah			
	3	002 - Materi Pengelolaan Aspirasi		-	
	4	Masyarakat dan Daerah 007 - Rekomendasi Kebijakan Atas			
	4	Tabulasi Data Asmasda Legislasi			
		Rancangan Undang - Undang			
	5	002 - Rekomendasi Kebijakan atas		_	
	J	Tabulasi Data Asmasda Legislasi			
		Pandangan dan Pendapat atas			
		Rancangan Undang-Undang Usul			
		Pemerintah dan DPR			
		001 - Penyusunan Rekomendasi	Rp	273.100.000,00	
		Kebijakan dalam program pembangunan			
		dan keuangan negara			
	6	003 - Rekomendasi kebijakan atas		-	
		tabulasi data ASMASDA legislasi			
		Pertimbangan atas Rancangan Undang-			
		Undang APBN			
	7	004 - Rekomendasi kebijakan atas		-	
		tabulasi data ASMASDA legislasi			
		Pertimbangan atas Rancangan Undang-			
		Undang Lainnya			
	Don	nyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI		_	
	1	005 - Rekomendasi kebijakan atas		-	
	-	tabulasi data ASMASDA pengawasan atas			
		pelaksanaan Undang-Undang			
	2	006 - Rekomendasi Kebijakan atas			
	2	Tabulasi Data Asmasda untuk		-	
		Pemantauan dan Peninjauan			
	3	001 - Pemantauan dan Evaluasi		·-	
	-	Rancangan Peraturan Daerah dan			
		Peraturan Daerah			
		*Catatan: Target dan anggaran yang masih kosong ak	an be	rlaku di tahun 2026	

Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA

A.

В.

PIHAK PERTAMA

Oni Choiruddin, S.H., M.M. NIP.196804291997031001 Dr. Sri Sundari, SH., M.M., CGCAE. NIP.196705281989022001